



RINGKASAN

SURYA ABADI SEMBIRING. Analisis Ekonomi Terhadap Instruksi Presiden Tentang Kebijakan Perberasan Nasional Tahun 2005-2008 (**HARIANTO**, sebagai Ketua, **HERMANTO SIREGAR** dan **BUNGERAN SARAGIH**, sebagai Anggota Komisi Pembimbing).

Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan merupakan tindakan pemerintah mempengaruhi ekonomi perberasan sehingga peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan dan stabilisasi ekonomi tercapai. Tujuan penelitian yaitu: (1) mendeskripsikan implementasi kebijakan perberasan dari perspektif petani, (2) mengevaluasi implementasi kebijakan perberasan pada tingkat nasional, dan (3) menganalisis dampak kebijakan perberasan terhadap tujuan kebijakan perberasan dan kesejahteraan produsen dan konsumen.

Jenis data yang digunakan yaitu data *time series* dan *cross section*. Data *cross section* diperoleh melalui survey kepada 30 orang Kontak Tani, di kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara. Data *time series* adalah data bulanan dari Maret 2005-September 2009. Model kebijakan perberasan menggunakan spesifikasi persamaan simultan. Data *cross section* berguna untuk menjelaskan implementasi kebijakan perberasan pada tingkat petani, sedangkan data *time series* untuk menjelaskan implementasi kebijakan perberasan pada tingkat nasional. Hipotesis penelitian yaitu: (1) implementasi kebijakan perberasan efektif pada tingkat petani, (2) kebijakan perberasan efektif meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan dan stabilisasi ekonomi, dan (3) kebijakan perberasan berdampak terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen.

Temuan penelitian terkait kebijakan bantuan benih, kebijakan pupuk bersubsidi dan kebijakan irigasi pada tingkat petani antara lain: (1) distribusi bantuan benih kurang efektif karena kelompok tani yang memiliki luas hamparan sawah yang sama ternyata menerima jumlah bantuan benih berbeda, disisi lain kelompok tani yang memiliki luas hamparan sawah yang kecil mendapatkan jumlah bantuan benih yang lebih besar, (2) kebijakan pupuk bersubsidi kurang efektif karena harga yang dibayar petani untuk memperoleh pupuk urea, SP, ZA dan NPK lebih besar dari harga eceran tertinggi dan persentase harga beli pupuk oleh petani menunjukkan kecenderungan naik, dan (3) kendala terbesar yang dihadapi petani dalam mengimplementasikan kebijakan perberasan adalah ketersediaan air, disisi lain posisi daerah kecamatan Sei Rampah yang berdekatan dengan ibukota merupakan daya tarik terbesar terjadinya konversi lahan sawah seluas 5 000.3 ha pada kurun waktu 2000-2006.

Petani mengikuti kebijakan harga pembelian pemerintah, mampu membedakan gabah kering panen dengan gabah kering giling tetapi kurang memperhatikan kandungan kadar air gabah dalam transaksi dengan agen/pedagang padi. Fakta menunjukkan harga jual gabah petani lebih tinggi 10-11 persen di atas harga pembelian pemerintah namun petani tetap mengharapakan pemerintah meningkatkan harga gabah kering panen dan membeli langsung gabah petani. Harga Gabah Kualitas B dan B-II baik ditingkat petani dan penggilingan lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Temuan penelitian terkait kebijakan perberasan di tingkat nasional antara lain: (1) ketersediaan varietas Ciherang tertinggi dibanding dengan varietas padi lainnya, tetapi pada tahun 2008 terendah, yaitu pada Mei 2008, (2) harga pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK diatas Harga Eceran Tertinggi. Semakin besar perbedaan antara Harga Eceran Tertinggi dengan harga pupuk, maka biaya dikeluarkan petani semakin naik, (3) kadar air dan kadar kotoran Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling pada tingkat nasional lebih rendah dari persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, (4) harga Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling pada musim panen raya lebih rendah dari musim panen gadu dan musim panceklik, (5) dalam kurun waktu Maret 2005 sampai September 2008, harga beras pengecer lebih tinggi dari harga beras dunia, (6) sumbangan beras terhadap inflasi tertinggi pada musim panceklik, dan (7) jumlah pembelian gabah/beras pada musim panen raya lebih tinggi dibandingkan dengan musim gadu dan musim panceklik, sebaliknya penyaluran beras Bulog dan Raskin terendah pada musim panceklik.

Persamaan simultan kebijakan perberasan terdiri dari 15 persamaan struktural dan 11 persamaan identitas. Berdasarkan hasil pendugaan parameter kebijakan perberasan nasional diperoleh hasil sebagai berikut: (1) jumlah beras impor responsif terhadap harga beras dunia, nilai tukar rupiah dan harga beras pengecer dalam jangka pendek, dengan elastisitas jangka pendek masing-masing -2.552, -3.594 dan 16.318, (2) jumlah pengadaan beras oleh Bulog responsif terhadap harga gabah kering panen, jumlah produksi beras baik jangka pendek dan jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek -1.698 dan 1.028 sedangkan jangka panjang -3.715 dan 2.248, (3) jumlah penyaluran beras pemerintah responsif terhadap harga beras di pengecer baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan elastisitas jangka pendek 4.835 sedangkan jangka panjang 8.447. Jumlah penyaluran beras pemerintah responsif terhadap dummy variabel dalam jangka panjang, dengan elastisitas 1.088, (4) penyaluran beras raskin responsif terhadap jumlah penduduk miskin baik dalam jangka pendek dan panjang, dengan elastisitas jangka pendek sebesar -1.804 dan jangka panjangnya -2.302, sedangkan penyaluran beras raskin responsif terhadap jumlah rumah tangga penerima Raskin dalam jangka pendek, dengan elastisitas 1.045, (5) harga gabah kering panen responsif terhadap harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen dan kadar air gabah kering panen dalam jangka panjang dengan elastisitas 1.175 dan -3.944, (6) indeks dibayar petani padi responsif terhadap harga pupuk NPK dalam jangka pendek dengan elastisitas jangka pendek sebesar 1.198, dan (7) harga beras pengecer responsif terhadap harga beras pembelian pemerintah dari Bulog dalam jangka pendek dengan dengan elastisitas jangka pendek 1.869.

Berdasarkan simulasi terhadap model persamaan simultan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: (1) kebijakan peningkatkan 10 persen harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen berdampak terhadap peningkatan penerimaan petani dan nilai tukar petani padi, masing-masing 7.792 dan 11.612 persen. Kebijakan tersebut berdampak terhadap peningkatan persediaan beras masyarakat, persediaan beras domestik dan surplus beras, masing-masing 11.904, 7.232 dan 13.154 persen, diikuti harga beras pengecer turun 2.693 persen, (2) sebaliknya, dampak kebijakan peningkatkan harga eceran tertinggi pupuk NPK 10 persen menyebabkan penerimaan petani dan nilai tukar petani padi turun, masing-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

masing 0.139 dan 0.054 persen. Kebijakan tersebut mengakibatkan persediaan beras masyarakat, persediaan beras domestik dan surplus beras turun masing-masing 0.526, 0.316 dan 0.589 persen, diikuti dengan, harga beras pengecer naik 0.145 persen, dan (3) dampak skenario kombinasi kebijakan tunggal dan kombinasi kebijakan, kecuali dampak peningkatan 10 dan 15 persen Harga Eceran Tertinggi pupuk NPK, sudah mengarah kepada perbaikan kesejahteraan, karena produsen dan konsumen beras menjadi lebih baik, sebaliknya peningkatan 10 dan 15 persen harga eceran tertinggi pupuk NPK menghasilkan net surplus yang negatif, dimana konsumen di pihak yang dirugikan.

Kesimpulan penelitian yaitu: (1) implementasi kebijakan Bantuan Langsung Benih Unggul, pupuk bersubsidi dan perbaikan jaringan irigasi tidak efektif untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan, sebaliknya kebijakan harga pembelian pemerintah efektif, (2) peningkatan 10 dan 15 persen harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen berdampak terhadap peningkatan penerimaan petani, nilai tukar petani padi petani, ketahanan pangan dan penurunan harga beras, selain itu kebijakan ini meningkatkan surplus produsen dan konsumen, (3) peningkatan 10 dan 15 persen harga eceran tertinggi pupuk NPK berdampak terhadap penurunan penerimaan petani dan nilai tukar petani padi, ketahanan pangan, sedangkan harga beras meningkat, dan kebijakan ini merugikan kepada konsumen karena kehilangan surplus konsumen, (4) peningkatan 10 persen realisasi penyaluran pupuk NPK berdampak terhadap peningkatan penerimaan petani, ketahanan pangan dan penurunan harga beras, tetapi harga gabah kering panen turun sehingga produsen dirugikan karena kehilangan surplus produsen, dan (5) kombinasi peningkatan harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen 10 dan 15 persen diikuti dengan peningkatan harga beras pembelian Bulog, harga eceran tertinggi pupuk NPK, realisasi penyaluran pupuk NPK dan jumlah rumah tangga penerima Raskin masing-masing 10 persen berdampak terhadap peningkatan penerimaan petani, nilai tukar petani padi, ketahanan pangan dan penurunan harga beras, selain itu kebijakan ini meningkatkan surplus produsen dan konsumen.

Tujuan kebijakan perberasan dalam Inpres tahun 2005-2008 tercapai apabila pemerintah mengimplementasikan kombinasi harga pembelian pemerintah terhadap gabah kering panen, harga beras pembelian Bulog, harga eceran tertinggi pupuk NPK, jumlah rumah tangga penerima beras Raskin dan realisasi penyaluran pupuk NPK.

Upaya lainnya yang perlu dilakukan pemerintah antara lain melakukan pembangunan irigasi dan perbaikan sistem jaringan irigasi, membeli langsung gabah petani, memfasilitasi pembentukan koperasi petani baik di tingkat desa atau kelompok tani, dan meneruskan kebijakan pengadaan beras oleh Bulog. Model kebijakan perberasan ini perlu disempurnakan dengan memasukkan variabel yang relevan dan menggunakan data tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.